

SKRIPSI

**AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG
PENDIDIKAN DASAR DI DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT NUSA
TENGGERA TIMUR**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Satu (S1)
pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram



Oleh:

RESTI
2019B1B101

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2024

**AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG
PENDIDIKAN DASAR DI DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT NUSA
TENGGERA TIMUR**

**Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Mataram**

ABSTRAK

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting, hal ini sesuai dengan tujuan dari pendidikan yakni untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang berimbas kepada peningkatan taraf hidup bangsa Indonesia. agar tidak tertinggal dengan bangsa lain pendidikan menjadi tumpuan harapan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk itu pendidikan wajib diberikan kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali masyarakat yang hidup dikota maupun daerah terpencil. adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah : 1) bagaimana langkah dinas pendidikan, kepemudaan dan olahraga dalam meningkatkan pelayanan pendidikan dasar di SD Pulau Rinca desa pasir panjang? 2) apa saja hambatan dinas pendidikan, kepemudaan dan olahraga dalam meningkatkan pelayanan pendidikan dasar di SD Pulau Rinca desa pasir panjang? adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 1) untuk mengetahui bagaimana langkah dinas pendidikan kepemudaan dan olahraga dalam meningkatkan pelayanan pendidikan dasar di SD Pulau Rinca desa pasir panjang.2) untuk mengetahui apa saja hambatan dinas pendidikan kepemudaan dan olahraga dalam meningkatkan pelayanan pendidikan dasar di SD Pulau Rinca desa pasir panjang metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan datanya adalah dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. teknik analisa data yaitu menggunakan reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik sejauh ini belum berjalan dengan efektif karena dilihat dari sarana prasarana, dana bantuan operasional sekolah (Bos) dan keejahtraan guru yang sampai saat ini kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah sekolah yang berada di desa pasir panjang sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah untuk membantu memecahkan masalah pendidikan yang terjadi didesa pasir panjang.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Pelayanan, Pendidikan

**ACCOUNTABILITY OF PUBLIC SERVICES IN BASIC EDUCATION AT
THE DEPARTMENT OF EDUCATION, YOUTH, AND SPORTS IN WEST
MANGGARAI REGENCY, EAST NUSA TENGGARA**

**Faculty of Social and Political Sciences,
Muhammadiyah University of Mataram**

ABSTRACT

Education is a crucial aspect of societal development, aligning with its purpose of enlightening the nation's citizens, which in turn contributes to improving the standard of living in Indonesia. Education is pivotal for enhancing the quality of human resources, ensuring the nation does not fall behind others. Therefore, education must be provided to all citizens, including those living in urban areas as well as in remote regions. The research questions of this study are: 1) What steps has the Department of Education, Youth, and Sports taken to improve basic education services at SD Pulau Rinca, Pasir Panjang Village? 2) What obstacles does the Department face in enhancing basic education services at SD Pulau Rinca, Pasir Panjang Village? The objectives of this study are: 1) To identify the steps taken by the Department of Education, Youth, and Sports to improve basic education services at SD Pulau Rinca, Pasir Panjang Village. 2) To determine the obstacles faced by the Department of Education, Youth, and Sports in improving basic education services at SD Pulau Rinca, Pasir Panjang Village. The research method used is qualitative, with data collection techniques including interviews, observation, and documentation. The types of data used in this study are primary and secondary data. The data analysis techniques involve data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the local government's efforts to improve public services have not been effective. This is evident from the lack of adequate facilities and infrastructure, operational school funds (BOS), and teacher welfare, which have not received sufficient attention from the government. Schools in Pasir Panjang Village urgently need government support to address the educational challenges they face.

Keywords: *Accountability, Public Service, Education*

MATARAM
MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan aspek penting dalam kehidupan setiap individu. Pendidikan merupakan fokus utama dalam agenda Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses terhadap layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Jelaslah bahwa cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, mengutamakan tercapainya kesejahteraan umum dan pendidikan bagi warga negara. tidak dapat dihindari bahwa saat ini Pendidikan adalah sesuatu yang menjadi salah satu kebutuhan hidup manusia. walaupun setiap manusia membutuhkan Pendidikan yang tidak sama atau berbeda-beda baik itu jenjang ataupun tempat pendidikannya (Setyasih, 2023).

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan merupakan suatu usaha sadar dan terencana setiap orang untuk menciptakan suasana belajar dan proses belajar mengajar agar peserta didik aktif dalam mengembangkan suatu potensinya guna untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan dan akhlak mulia, serta adanya keterampilan yang di peroleh dari dirinya sendiri, masyarakat, bangsa dan negara itu sendiri (Hermansyah, 2022).

Saat ini, Pemerintah telah membentuk Sistem Pendidikan Nasional Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan, sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. Pemerintah tentu saja menghadapi berbagai tantangan yang dapat memengaruhi kemajuan Pendidikan di Indonesia. Berbagai tantangan yang dihadapi oleh sistem pendidikan di Indonesia meliputi masalah pemerataan, kualitas, relevansi, efektivitas, dan efisiensi. Pemerintah akan selalu memprioritaskan penanganan masalah-masalah ini sebagai bagian dari komitmennya untuk mencapai salah satu tujuan utama bangsa, meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan warga negaranya secara menyeluruh. Tingkat perhatian pemerintah yang diberikan terhadap pendidikan di daerah terpencil tidak setara dengan yang diberikan kepada lingkungan perkotaan, meskipun lingkungan perkotaan lebih mudah diakses. (Widanti, 2022).

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggaraan pelayanan termasuk di dalamnya adalah pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Pelayanan Publik, pemerintah pusat menyerahkan tanggung jawab atau tugas kepada daerah berdasarkan asas otonomi daerah. Pelimpahan urusan tersebut dikarenakan letak geografis Indonesia yang unik sebagai negara kepulauan dari Sabang sampai Merauke dengan pusat pemerintahan di Jakarta. Secara sederhana, apabila jarak menjadi kendala, maka kewenangan tersebut dilimpahkan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi. Apabila tanggung jawab pelayanan publik dilimpahkan kepada seseorang yang memiliki

kewenangan yang luas, maka kewenangan pengelolaan pendapatan dan pendapatan daerah pun menjadi hal yang mutlak. Tanpa adanya pelimpahan tersebut, maka otonomi daerah menjadi tidak bermakna lagi. Berdasarkan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah diamanatkan bahwa anggaran negara yang cukup besar harus dialokasikan untuk pendidikan. Secara spesifik, paling sedikit 20% dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) harus dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan nasional. Bisa dilihat dari pasal tersebut. adanya suatu hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dapat di artikan bahwa ada suatu pembagian keuangan antar pusat dan daerah untuk mendanai kegiatan-kegiatan sektor publik di antaranya adalah Pendidikan (Tabo et al., 2022).

Menurut dokumen United Nations Development Programme (UNDP: 2004), tata kelola pemerintahan yang baik mengacu pada pemanfaatan kewenangan politik, ekonomi, dan administratif untuk menangani urusan negara secara efektif di semua tingkatan. Tata kelola pemerintahan yang baik berfungsi sebagai alat kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi yang mendorong kesejahteraan, integritas, dan kohesi sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, tata kelola pemerintahan yang efektif memerlukan layanan politik yang berkualitas tinggi. Pemerintah memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas layanan publik, khususnya di sektor pendidikan. Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan

memastikan bahwa kebutuhan belajar siswa terpenuhi melalui inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk memenuhi persyaratan sekolah. Keberadaan banyak sekolah di berbagai daerah mengharuskan pemerintah pusat untuk mendelegasikan kewenangan kepada daerah-daerah tersebut, sehingga terjadi pergeseran dari sentralisasi menjadi desentralisasi dalam pembagian tugas. Untuk menjawab tuntutan layanan publik di bidang pendidikan, pemerintah telah mendirikan Dinas Pendidikan di Kabupaten Manggarai Barat.

Dinas Pendidikan merupakan lembaga pemerintah yang berfokus pada penyelenggaraan urusan di bidang pendidikan. Hal ini meliputi pengembangan kurikulum, peningkatan sarana dan prasarana, serta menjamin mutu pendidikan secara menyeluruh bagi siswa. (Riska Chyntia Dewi & Suparno Suparno, 2022). dalam melaksanakan tugasnya yang cukup luas dalam pelayanan Pendidikan di tingkat daerah

Tugas Dinas Pendidikan itu sendiri melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan sedangkan fungsi dari Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan;
3. pelaksanaan koordinasi penyelenggraan urusan di bidang pendidikan;
4. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan;

5. pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum,kepegawaian,keuangan,evaluasi,dan pelaporan;dan
6. pelaksanaan pengawasan,pengendalian evaluasi,dan pelaporan di bidang pendidikan.

Kondisi dari Dinas Pendidikan di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat ini sendiri sangat jauh dari harapan. Hal itu dibuktikan dengan mutu dan kualitas pendidikan tidak mampu bersaing dengan kabupaten lainnya di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, Selasa (13/0/2023)

Ia juga mengaku, Pemkab (pemerintah kabupaten) manggarai barat memiliki komitmen yang tinggi untuk membangkitkan sektor pendidikan.dirinya meminta dukungan seluruh elemen masyarakat baik swasta maupun media massa untuk memberi masukan untuk kemajuan pendidikan di kabupaten Manggarai Barat. Pelaksana tugas (Plt), Dinas Pendidikan Kemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat, Hila Madin mengaku untuk memajukan sektor pendidikan, pemerintah kabupaten manggarai barat kedepan akan fokus perbaikan sarana dan prasarana pendidikan serta akan terus meningkatkan sumber daya para tenaga pengajar pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat(pempus) dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur(NTT) untuk memajukan sektor pendidikan.

Program-program yang sudah dilakukan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga itu sendiri antara lain Dinas PKO Mabar Gelar Liga Pelajar Tingkat SMP Tahun 2023, 5192 Peserta Didik SMP di Manggarai Barat

Sukses Mengikuti ANBK, Dinas PKO Mabar Bekerja Sama dengan BGP Provinsi NTT Gelar Lokakarya 1 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9, Dinas PKO Mabar Gelar Sosialisasi Perencanaan Berbasis Data dan Kampanye Gerakan Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan, Dinas PKO Mabar Ikuti Pelatihan Pendidikan Sepekan di Kota Toyama-Jepang. Dinas PKO Mabar Gelar Sosialisasi Pencegahan Perundungan di Sekolah, BPMP NTT dan Dinas PKO Mabar Dampingi Pengawas Sekolah Demi Perkuat Program Prioritas Kemendikbudristek, Kwartab Gerakan Pramuka Manggarai Barat Menggelar Kursus Pengelola Gugus Depan, Bunda Paud Manggarai Barat Terus Kampanyekan Gerakan Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan, BGP NTT selenggarakan Lokakarya perencanaan Pembelajaran 1 Program Sekolah Penggerak (PSP) Angkatan 3 .

Salah satu upaya dari Dinas Pendidikan kedepan pihaknya akan terus mengoptimalkan 8 standar pendidikan, perkuat sumber daya tenaga pengajar dan perbaikan fasilitas penunjang pendidikan, dari dinas pendidikan tersebut akan terus menerus turun ke sekolah untuk mengecek dan melihat langsung kendala yang dihadapi oleh lembaga pendidikan di wilayah Mangarai Barat dan lembaga pendidikan dasar hingga menengah atas di kabupaten manggarai barat harus mampu menciptakan lulusan yang mampu bersaing di perguruan tinggi (PT) ternama di indonesia karna masi banyaknya smk dan sma di kabupaten manggarai barat yang belum mampu menghantar para siswa siswi lulusan sekolah untuk melanjutkan ke PT yang ternama dan terbaik di NTT. Hal ini di sebabkan oleh banyaknya persoalan, sehingga kedepan menjadi tugas kepala sekolah dan para

guru SMA dan SMK untuk mendesain konsep pembelajaran yang tepat maka kemudian dinas Pendidikan melahirkan sebuah Unit pembantu dalam memudahkan pelayanan Pendidikan tersebut dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di kecamatan. salah satu UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat

Berdasarkan hasil observasi awal, SDN Pulau Rinca, Desa Pasir Panjang terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Desa ini terdiri dari enam dusun, yaitu Dusun Kukusan, Dusun Bajo, Dusun Beringin Jaya, Dusun Beringin Baru, Dusun Komodo, dan Dusun Kerora. Untuk mencapai desa ini dari Kota Labuan Bajo dengan menggunakan transportasi laut, diperlukan waktu sekitar dua jam. Letaknya yang terpencil membuat desa ini menghadapi berbagai tantangan sosial, seperti terbatasnya akses listrik, jaringan, air bersih, transportasi, serta sarana dan prasarana sekolah.

Desa Pasir Panjang memiliki tiga sekolah dasar, yaitu SDN Pulau Rinca, SDI Kerora, dan SD Kukusan. Kondisi pendidikan di desa ini memprihatinkan. Bangunan sekolah dalam kondisi memprihatinkan, banyak ruang kelas yang tidak layak pakai. Dinding sekolah rapuh, bahkan ada yang ambruk. Tidak adanya pintu dan pagar sekolah yang rusak menambah risiko keselamatan, apalagi jika mempertimbangkan keberadaan komodo di area tersebut. Sangat penting bagi pemerintah untuk memberikan bantuan dan perhatian untuk meningkatkan sarana dan prasarana Sekolah SDN di Desa Pasir Panjang.

Tabel 1.1.

NO	Daftar SD	Tahun	Permasalahan
1.	SDN Pulau Rinca	Tahun,2023	Penggunaan media pembelajaran yang berbasis IT masih rendah, penerapan kurikulum merdeka dalam pelaksanaan P5, tingkat kenakalan siswa dan kehadirannya yang masih rendah dan budaya literasi masih rendah dengan kurangnya pemanfaatan yang belum maksimal.
2.	SDI Kerora	Tahun,2023	Kondisi SDI kerora selama ini sangat memperhatikan, dimana ruangan kelas tidak berdingding, komodo bebas masuk kedalam ruangan kelas yang menyebabkan anak sekolah tidak nyaman dan merasa terganggu saat KBM berlangsung, kondisi gedung SDI kerora selama ini rusak parah, tembok-tembok dinding dari kayu sudah mulai rusak bahkan tak ada lagi pembahas yang utuh antara ruangan,kondisi ini membuat para siswa takut bila komodo yang hidup tak jauh dari sekolah tersebut bisa saja masuk saat KBM sedang berlangsung.
3	SD Kukusan	Tahun,2023	Kondisi gedung sekolah dan ruang kelas sudah tidak layak pakai lagi karena sudah rusak parah. Banyak gedung yang tidak berpintu, dindingnya rapuh, bahkan ada yang sudah ambruk.

1.1. Gambar SDN Pulau Rinca Dan SDI Kerora Desa Pasir Panjang



Sumber: SDN Pulau Rinca tahun 2024



Sumber: SDI Kerora tahun 2024

Berdasarkan dari tabel dan gambar di atas dapat di simpulkan adanya jumlah, tahun, dan permasalahan-permasalahan yang ada di SD tersebut, seperti sarana dan prasarana yang tidak memadai, bangunan sekolah, ruang kelas yang sudah tidak layak di pakai dan adanya permasalahan seperti penggunaan media pembelajaran yang berbasis IT masih rendah, penerapan kurikulum merdeka dalam pelaksanaan P5(Proyek penguatan profil pelajar pancasila) tingkat kenakalan siswa dan kehadiran siswa yang masih rendah.

Kepala sekolah memegang peranan penting dalam keberhasilan pengelolaan lembaga pendidikan. Kepala sekolah bertanggung jawab untuk mengawasi semua kegiatan di dalam lembaga, termasuk pengelolaan sarana dan prasarana. Kurangnya manajemen yang efektif di lembaga pendidikan sering kali menurunkan kualitas sarana dan prasarana yang dimilikinya, yang merupakan masalah yang meluas. Sangat penting untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana tersebut dikelola secara efektif untuk memaksimalkan proses pembelajaran. Salah satu elemen kunci dalam membangun standar pendidikan yang tinggi adalah penyediaan fasilitas sekolah.

Fasilitas tersebut mencakup infrastruktur dan sumber daya yang penting untuk memfasilitasi kegiatan pendidikan di sekolah. Untuk memberikan pengalaman belajar mengajar yang luar biasa, sangat penting untuk memiliki fasilitas sekolah yang memenuhi standar layanan minimum. Lebih jauh, manajemen yang efektif memegang peranan penting dalam memastikan kelancaran operasional fasilitas tersebut. Memiliki fasilitas yang canggih dan infrastruktur yang berkembang dengan baik memastikan bahwa siswa dan guru sepenuhnya puas selama proses belajar mengajar.

Masalah di atas adalah bentuk masalah yang terjadi di SDN Pulau Rinca, SDI Kerora, dan SD Kukusan yang menjadi permasalahan umum dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. perlu adanya pelayanan yang baik dan maksimal yang di berikan pemerintah kepada sekolah tersebut. Sedangkan untuk jumlah siswa pendidikan sekolah dasar di desa Pasir

Panjang pada tahun 2024 adalah sebanyak 234 siswa. Di SDN Pulau Rinca sendiri memiliki jumlah siswa sebanyak 155 siswa dan 15 guru.

Pada tahun 2014, Badan Pusat Statistik mencatat, sebanyak 10.985 Desa atau kelurahan tidak ada sekolah dasar atau madrasah ibtidiyah. Penyebabnya lantaran tidak seimbangnya penyediaan infrastruktur layanan publik yang memadai. Selain itu, terdapat kesenjangan yang cukup signifikan dalam hal distribusi pendidikan, dengan perbedaan yang nyata dalam kualitas sarana dan prasarana pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Di daerah perkotaan, siswa cukup beruntung untuk memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi dengan sarana dan prasarana yang sangat baik, yang membedakan mereka dari siswa di daerah pedesaan. Untuk memastikan pemerataan akses pendidikan, penting untuk memiliki Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah di setiap desa.

Pemerintah harus memprioritaskan dan mengalokasikan sumber daya untuk memastikan ketersediaan sarana pendidikan di daerah terpencil, pegunungan, dan pesisir. Hal ini akan membantu mendorong pemerataan akses pendidikan bagi semua orang. Pendidikan tidak hanya mencakup pembangunan gedung sekolah, tetapi juga pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk sekolah.

Terkait kondisi geografis dan iklim, Kabupaten Manggarai Barat dikelilingi oleh berbagai batas wilayah. Di sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores, sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Sawu. Di

sebelah barat berbatasan dengan Selat Sape, dan di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Manggarai.

Kabupaten Manggarai Barat beriklim tropis, sama seperti daerah lain di Indonesia. Wilayah ini dicirikan oleh dua musim yang berbeda: musim kemarau dan musim hujan. Dari bulan Juni sampai September, arus angin berasal dari Australia dan membawa sedikit uap air, sehingga terjadi musim yang ditandai dengan kekeringan. Di sisi lain, dari bulan Desember sampai Maret, arus angin berasal dari Asia dan Samudra Pasifik, sehingga terjadilah musim hujan. Kondisi ini mengalami transformasi setiap enam bulan, selama periode transisi April-Mei dan Oktober-November. Mengingat dekatnya Manggarai Barat dan NTT dengan Australia, arus angin membawa uap air dari Asia dan Samudra Pasifik sampai ke wilayah Manggarai Barat. Akibatnya, kadar air berkurang, sehingga menyebabkan lebih sedikit hari hujan di Manggarai Barat dibandingkan dengan wilayah yang lebih dekat ke Asia. Manggarai Barat mengalami iklim yang relatif kering, dengan hanya 4 bulan (Januari sampai Maret dan Desember) yang relatif basah dan 8 bulan sisanya relatif kering.

Dari ke-3 sekolah dasar yang ada di desa pasir panjang tersebut peneliti lebih fokus meneliti pada SDN Pulau Rinca sehingga akan di kaitkan dengan judul yaitu PELAYANAN PUBLIK BIDANG PENDIDIKAN DASAR DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE (STUDI KASUS SDN PULAU RINCA DESA PASIR PANJANG KECAMATAN KOMODO)

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan informasi yang diberikan, penulis memaparkan rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana langkah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dalam meningkatkan pelayanan Pendidikan dasar di SDN Pulau Rinca desa pasir Panjang ?
2. Apa saja hambatan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dalam meningkatkan pelayanan Pendidikan dasar di SDN Pulau Rinca desa Pasir Panjang ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana langkah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga dalam meningkatkan pelayanan pendidikan dasar di SDN Pulau Rinca desa Pasir Panjang .
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dalam meningkatkan pelayanan Pendidikan dasar di SDN Pulau Rinca desa Pasir Panjang

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini menawarkan dua jenis manfaat: teoritis dan praktis.

Manfaat-manfaat ini dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memperluas pemahaman tentang pelayanan publik di bidang pendidikan dasar, khususnya berfokus pada studi kasus Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dalam praktiknya, ada beberapa keuntungan yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini, khususnya:

- a. Bagi penulis, hasil penelitian ini sebagai solusi potensial terhadap permasalahan yang dirumuskan.
- b. Melalui penelitian ini, pembaca diharapkan memperoleh wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang pelayanan publik di bidang pendidikan dasar.
- c. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi atau titik awal untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pokok bahasan yang sama.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Langkah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga dalam meningkatkan pelayanan pendidikan dasar di SD Pulau Rinca Desa Pasir Panjang

Berdasarkan hasil analisis penelitian mengenai pelayanan publik bidang pendidikan dasar dalam perspektif good governance, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pemerintah daerah manggarai barat belum maksimal melakukan peningkatan pelayanan pendidikan di Desa Pasir Panjang. Pemerintah sebagai salah satu institusi penyelenggara pelayanan secara sederhana dapat disebut sebagai penyedia layanan sudah jelas harus memberikan pelayanan publik sesuai dengan peraturan yang berlaku lalu bagaimana peran masyarakat atau keterlibatan masyarakat saat ini menjadi bagian yang perlu dioptimalkan dengan adanya keterlibatan masyarakat, para pihak dapat bersama sama untuk meningkatkan kualitas pelayanan fungsi control dari masyarakat juga dapat membantu bagaimana pelayanan publik dapat terselenggara dengan sebagaimana mestinya untuk mewujudkan keterlibatan masyarakat tersebut dibutuhkan kesadaran dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai seperti apa peran masyarakat didalam pelayanan publik, termaksud seperti apa hak dan kewajiban masyarakat.

5.1.2 Hambatan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga dalam meningkatkan pelayanan pendidikan dasar di SD Pulau Rinca Desa Pasir Panjang

Hambatan dari dinas pendidikan kepemudaan dan olahraga dalam meningkatkan pelayanan pendidikan sebagai berikut:

kurangkanya komunikasi antara pihak sekolah dan pemerintah daerah yang menjadi hambatan dalam peningkatan pelayanan pendidikan di Desa Pasir Panjang dan peningkatan pelayanan antara SD Kerora dan SD Pulau Rinca, lebih meningkat di SD Pulau Rinca karena bantuan dari BUMN yang merehab seluruh bangunan sekolah, sedangkan SD kerora masih sebagian.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai masukan, yang diantaranya sebagai berikut:

1. Pemerintah harus lebih memperhatikan pelayanan administrasi pendidikan didaerah kepulauan sehingga pemerataan pendidikan dapat terlaksana dengan baik
2. Meningkatkan dana bantuan untuk sekolah dasar didesa pasir panjang khususnya SD kerora yang jauh tertinggal dengan SD Pulau Rinca
3. Kepala sekolah didesa pasir panjang harus lebih aktif dalam mengawali pembangunan disekolah dan komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah agar pemerataan pendidikan dapat terlaksana.